



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAKSIMILI (021) 7816083

Nomor : B-489.2/KP.430/B/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu lembar
Hal : Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)
Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan
Sarana Pertanian

06 April 2026

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor B-1212/Kp.430/G/03/2026 tanggal 10 Maret 2026 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkup Kementerian Pertanian. Bersama ini kami sampaikan data wajib lapor LHKAN lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Lapo 2025. Berikut kami sampaikan Rekapitulasi Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2025 lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana data terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal,



Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.
NIP 197502012002121001

Lampiran Surat Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian
Nomor : B-489.2/KP.430/B/04/2026
Tanggal : 06 April 2026

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA (LHKAN) TAHUN 2025
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

No.	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	353
	a. Wajib LHKPN	16
	b. Tidak Wajib LHKPN	337
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	16
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	0
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (<i>Coretax</i> DJP)	337
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan (<i>Coretax</i> DJP)	0
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	0

Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal,



Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T.
NIP 197502012002121001